

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi*, Press, Jakarta.
- , 2014, *Perihal Undang-Undang*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 1997, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatimah, Siti, 2005, *Praktik Judiial Review di Indonesia (sebuah pengantar)*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Fatmawati, 2006, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Goodpaster, Gary, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa "Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK"*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR PRESS Pekanbaru, Riau.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2017, *Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi, dan materi muatan)*, cetakan ke-18, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi (menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia)*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Konoras, Abdurrahman, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna (historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas)* cetakan keempat, PT Gramedia, Jakarta.
- , 2020, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan Edisi Komperhensif*, Mizan, Jakarta.
- , dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Buku Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 1991, *Teknik dan Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara*, Tarsito, Bandung.

Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.

S Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

Siahaan, Maruarar. 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Siahaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.

Sirajuddin, 2015, *Legislative drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Setara Press, Malang.

-----, dkk, 2015, *Legislative drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafino Persada, Jakarta.

Soemantri M, Sri, 1986, *Hak Menguji Materi di Indonesia*, Alumni, Bandung. Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi. (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1754).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi. (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 127).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

C. Karya Ilmiah

Anggara, Dharma Satya, 2017, Kualifikasi Konseptual Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur Non-litigasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Permenkumham No.32 Tahun 2017, Skripsi, Fakultas Hukum UGM., Abstrak.

Atamimi, A. Hamid S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahann Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta.

Dharma Satya Anggara, 2018, *Kualifikasi konseptual mekanisme penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Oermenkumham No. 32 Tahun 2017*, Skripsi, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Irianto, Sulistyowati, 2020, Orasi Ilmiah (Pendidikan Hukum untuk Indonesia Masa Depan: Sebuah Catatan Kritis) , Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-74 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2010

Kalalo, Julianto Jover Jotam, 2018, *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan*, Disertasi, Makassar.

King Faisal Sulaiman, 2016, “*Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh., 1996, *Kekacauan Teoritis dalam Ketentuan Judicial Review*, Jurnal UNISIA Nomor 29 Tahun XVI Triwulan I.

Prasetyaningsih, Rahayu, 2017, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2.

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kompas.com, 2016, *Kemendagri Tegaskan Pembatalan 3.143 Perda Sesuai Aturan*,
<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/16372801/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan>, 2016.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Seminar bertajuk “*Quo Vadis, Tata Kelola Regulasi Indonesia? Telaah Akademis Permenkumham No. 32 Tahun 2017, No. 22 Tahun 2018, No. 23 Tahun 2018*”, di Fakultas Hukum UI Depok, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc13662cd4c/permenkumham-penyelesaian-sengketa-konflik-norma-dinilai-ilegal>, 1 November 2018, diakses terakhir pada tanggal 12 Maret 2019.